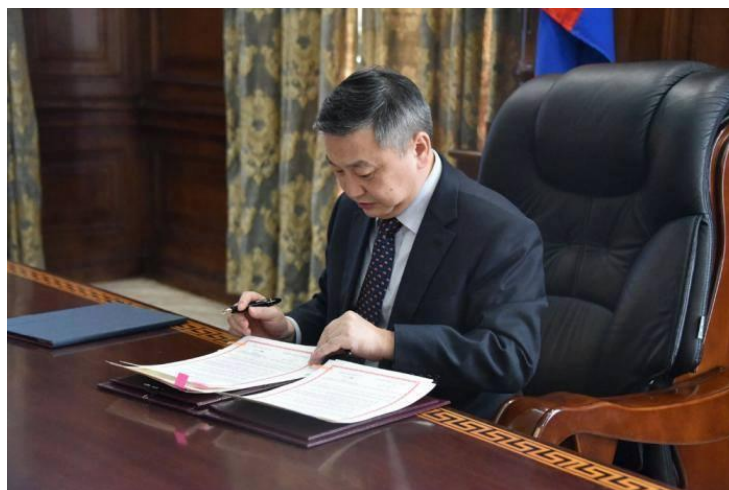


COURTESY CALL KEPADA H.E. MR.ZANDAAKHUU ENKHBOLD, CHAIRMAN OF THE STATE GREAT HURAL OF MONGOLIA.

Pada pertemuan ini, delegasi menyampaikan salam dari Ketua DPR RI, Dr. Ade Komarudin kepada Ketua State Great Hural (Parlemen Mongolia), **H.E. Mr.Zandaakhuu ENKHBOLD**. Delegasi juga menyampaikan Memorandum of Understanding (MoU) antara DPR RI dengan State Great Hural Mongolia yang telah ditandatangani oleh Ketua DPR RI untuk ditandatangani oleh Ketua Parlemen Mongolia. Point-point yang telah disepakati dalam MoU yaitu :

1. Para pihak akan saling bertukar pengetahuan mengenai undang-undang dan dokumen hukum yang mengatur struktur dan fungsi masing-masing parlemen, serta pengalaman dan informasi terkait pencapaian dan demokrasi yang lebih baik yang sejalan dengan perkembangan sosio-ekonomi.
2. Para pihak akan mengadakan pertemuan bilateral dalam berbagai ajang internasional untuk saling bertukar pandangan terkait isu-isu hubungan bilateral serta isu di tingkat regional dan multilateral.
3. Para pihak, sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan antar parlemen sekaligus menyempurnakan struktur-struktur dan fungsi keparlemenan serta bertukar pengalaman, akan mengadakan pertukaran kunjungan antar Anggota Parlemen, Komisi-komisi Tetap, Kelompok Persahabatan Parlemen dan staf Sekretariat Parlemen. Para pihak akan memberikan seluruh dukungan yang diperlukan dengan memanfaatkan teknologi elektronik untuk mengembangkan hubungan dan kerja sama.
4. Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini akan tunduk kepada ketersediaan anggaran di masing-masing pihak.



H.E. Mr.Zandaakhuu ENKHBOLD menandatangani MoU DPR RI – State Great Hural

Sumber : <http://english.news.mn/content/236251.shtml>

PERTEMUAN DENGAN MR. OCTYABER BAASANKHU, KETUA KELOMPOK PERSAHABATAN ANTAR PARLEMEN MONGOLIA – INDONESIA

Ketua delegasi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Grup Kerjasama Bilateral adalah kelompok yang didirikan dengan fungsi untuk mempromosikan hubungan bilateral antara Parlemen Indonesia dan Mongolia. Diharapkan melalui GKSB kedua negara, MoU kerjasama antar parlemen kedua negara dapat diimplementasikan demi mengintensifkan kerja sama bilateral kedua negara.

Dalam pertemuan ini Mr. Baasankhu meminta agar Indonesia dapat segera memberikan Visa on Arrival bagi warga negara Mongolia yang berkunjung ke Indonesia untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara.

Terkait Visa On Arrival tersebut, ketua delegasi menyampaikan bahwa Kedubes Mongolia melalui Nota Diplomatik No. 69/15 tanggal 11 September 2015 telah menyampaikan permohonan mengenai pemberian fasilitas visa on arrival kepada warga negara Mongolia yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Pemohonan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Konsuler untuk mendapat tanggapan lebih lanjut.

Pertemuan Pertama JCBC RI – Mongolia pertama yang telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2015 telah dibahas hal ini dan RI akan mempertimbangkan agar Mongolia masuk dalam daftar negara penerima *Visa on Arrival* RI.

Dalam pertemuan ini juga disampaikan mengenai rencana kunjungan Pimpinan DPR RI untuk memenuhi undangan Parlemen Mongolia menghadiri forum ASEP9 di Mongolia pada tanggal 21 – 22 April 2016. Terkait lamanya jawaban yang diterima secara resmi oleh Mongolia dijelaskan oleh ketua delegasi, bahwa rencana kunjungan tersebut dibahas dalam beberapa tahap.

PERTEMUAN DENGAN MR.M.SONOMPIL, ANGGOTA THE STATE GREAT HURAL OF MONGOLIA, KETUA THE STANDING COMMITTEE ON SECURITY AND FOREIGN POLICY

Pada kesempatan ini delegasi menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta Mongolia dalam Bali Democracy Forum. Ketua menyampaikan bahwa delegasi juga telah membawa MoU antara kedua parlemen untuk ditandatangani oleh Ketua Parlemen Mongolia sebagai sarana untuk memperkuat kerjasama kedua parlemen dalam isu-isu seperti Sustainable Development Goals (SDGs), jenis kelamin, demokrasi, kejahatan terorganisir transnasional, korupsi dan obat-obatan terlarang. Untuk implementasi MoU tersebut diperlukan peran aktif dari kedua parlemen.

Terkait undangan dari Parlemen Mongolia kepada DPR RI untuk hadir dalam forum ASEP 9 yang akan dilaksanakan di Mongolia pada tanggal 21 – 22 April 2016, Ketua Delegasi menyampaikan bahwa Pimpinan DPR RI akan menghadiri forum parlemen tersebut.

Delegasi mengemukakan hubungan diplomatik Indonesia dan Mongolia yang telah dimulai sejak 21 Desember 1956 senantiasa berkembang dengan baik. Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada September 2012 telah membuka babak baru hubungan kedua negara. Kunjungan

Presiden RI kala itu untuk memenuhi undangan Presiden Mongolia Tsakhia Elbegdorj. Dalam pertemuan kedua pemimpin disepakati 6 (enam) prioritas bidang kerja sama kedua negara, yaitu: (1) pemajuan demokrasi, HAM, good governance, dan rule of law; (2) pertahanan; (3) perdagangan dan investasi; (4) pertambangan; (5) sosial budaya; dan (6) kerja sama di fora regional ataupun global. Kunjungan ini sangat penting mengingat bertepatan dengan momen 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Mongolia.

Oleh karena itu delegasi mendorong implementasi enam prioritas kerjasama yang telah disepakati oleh kedua pemimpin negara, terutama mengenai saling mendukung dalam forum internasional, kami memohon dukungan Parlemen Mongolia bagi pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2019-2020.

Disampaikan bahwa KBRI Indonesia di Beijing berencana untuk membuat buku 60 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Mongolia. Untuk itu diharapkan agar Pihak Mongolia dapat membantu pembuatan buku tersebut.

Mr. Sonompil menyampaikan apresiasi terhadap hubungan diplomatik antara kedua negara yang telah berjalan selama 60 tahun sejak tahun 1956. Pada tahun 2014, Mongolia juga telah membuka Kedutaan Besarnya di Jakarta. Hal ini menandakan bahwa Mongolia memandang penting Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Dengan ditandatanganinya MoU kedua parlemen, diharapkan hubungan bilateral kedua negara akan makin meningkat.

Mr. Sonompil juga meminta DPR RI untuk dapat mendorong keikutsertaan Presiden Joko Widodo dalam Forum ASEM (Asia Europe Meeting) yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2016 di Ulaanbaatar, Mongolia.

PERTEMUAN DENGAN CEO KADIN MONGOLIA, MRS. MAGVAN OYUNCHIMEG

Disampaikan oleh Mrs. Magvan bahwa KADIN Mongolia berdiri sejak tahun 1960. Saat ini memiliki keanggotaan lebih dari 3000 pengusaha, Kantor Cabang di 21 Provinsi, 25 Kantor Perwakilan di luar negeri, 32 Dewan Bisnis dan juga telah mengadakan kerjasama dengan 126 organisasi bisnis di lebih 100 negara di dunia. Sejak tahun 1990-an, KADIN Mongolia telah menempati posisi yang strategis dan berpengaruh di Mongolia.

Dalam kesempatan ini, KADIN Mongolia meminta agar dapat dihidupkan kembali kerjasama antara KADIN Mongolia dan KADIN Indonesia yang telah lama tidak aktif agar kembali dapat dilakukan kerjasama terhadap hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung perdagangan antar kedua negara, dan agar komoditas dari masing-masing negara dapat bersaing di dunia internasional. Kedua KADIN sendiri telah menandatangani MoU kerjasama sejak tahun 2001. Dengan adanya MoU tersebut, KADIN Mongolia berharap dapat ditingkatkan kerjasama di bidang bisnis dan investasi. Namun yang perlu dilakukan dalam jangka pendek ini adalah adanya pertukaran informasi mengenai potensi perdagangan antar kedua negara. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang lebih konkrit terkait implementasi MoU tersebut. Pihaknya berharap antara KADIN Mongolia dan KADIN Indonesia dapat saling ikut serta dalam Expo Perdagangan yang diselenggarakan di negara masing-masing untuk memperkenalkan komoditas produknya masing-masing.

Terkait EXPO ini, dijelaskan bahwa KADIN Mongolia telah beberapa kali mengundang KADIN untuk ikut serta dalam event yang diselenggarakan di Mongolia tersebut, namun KADIN Indonesia belum pernah menghadiri undangan tersebut. Mrs. Oyunchimeg berharap pertemuan ini dapat membawa kontribusi positif bagi peningkatan kerjasama antar KADIN kedua negara untuk mendorong potensi perdagangan antara Indonesia dan Mongolia.

Disampaikan bahwa perdagangan yang dilakukan melalui jalur pemerintah antara Indonesia dan Mongolia mencakup 30% dari seluruh nilai perdagangan kedua negara, sementara sisanya sebesar 70% merupakan kerjasama antara swasta dan swasta. Untuk itu perlu ditingkatkan persentase nilai perdagangan melalui jalur pemerintah.

Yang perlu ditingkatkan adalah kerjasama di bidang peternakan, pertanian dan kerjasama antar pengusaha muda. Mongolia memiliki keunggulan di bidang pertanian mengingat sinar matahari yang bersinar hampir sepanjang tahun. Potensi Mongolia lainnya adalah pariwisata yang didukung oleh pemandangan dan daerah-daerah yang menarik bagi wisatawan. Mongolia sendiri perlu banyak belajar mengenai pariwisata dari Indonesia. Untuk itu KADIN Mongolia meminta agar dapat diundang ke Indonesia untuk menimba pengalaman pengelolaan pariwisata di Indonesia. Pada tahun ini Mongolia juga akan mengadakan forum pertemuan tenaga kerja, untuk itu pihaknya meminta saran mengenai hal tersebut dari pihak Indonesia.

Menanggapi masukan dari KADIN Mongolia, Ketua Delegasi menyampaikan masukan dari KADIN Mongolia kepada KADIN Indonesia agar dapat didorong kerjasama antara kedua KADIN yang telah menandatangani MoU sejak tahun 2001 akan tetapi belum ada peningkatan kerjasama yang signifikan. DPR RI juga akan mendorong penyelenggaraan EXPO perdagangan di kedua negara serta keikutsertaan KADIN Indonesia dalam forum-forum bisnis tersebut. Selain itu delegasi juga akan mendorong pertukaran informasi dari kedua KADIN untuk lebih mengetahui potensi bisnis di kedua negara serta agar dapat meningkatkan kerjasama terutama di bidang pertanian, peternakan dan kerjasama antar pengusaha muda di kedua negara.

Delegasi menyampaikan bahwa nilai perdagangan antara kedua negara sebelum kedatangan Presiden SBY adalah sejumlah 6,59 juta dolar AS. Jumlah tersebut meningkat menjadi 26 juta dolar AS pada 2014. Untuk itu delegasi berharap agar nilai perdagangan antara kedua dapat terus meningkat di masa yang akan datang. Delegasi berharap KADIN Mongolia dapat menyampaikan info-info perdagangan di Mongolia melalui Kedutaan Besar Mongolia di Jakarta.

Hal yang menjadi kendala perdagangan kedua negara adalah tidak adanya Direct Flight ditambah daerah Mongolia yang bersifat Land Locked atau tidak memiliki Pelabuhan Kapal. Salah satu hal yang cukup potensial adalah kerjasama di bidang peternakan mengingat peternakan Mongolia yang cukup maju yaitu memiliki 56 juta ternak padahal penduduknya hanya berjumlah sekitar 3 Juta Jiwa.

Duta Besar Mongolia untuk Indonesia, H.E., Mrs. Shagdar Battsetseg yang juga hadir dalam pertemuan mengemukakan bahwa kerjasama yang akan didorong adalah peningkatan *People to People Contact* dan *Business to Business*.

Terkait peningkatan kerjasama di bidang pertanian, telah dilaksanakan *1st Joint Agricultural Working Group meeting* antara Kementerian Pertanian Indonesia dan the Ministry of Food and Agriculture of Mongolia, yang dilaksanakan di Bali pada

tanggal 29 September 2015. Begitu juga di bidang peternakan, kualitas ternak Mongolia telah menggunakan standar internasional

Disampaikan oleh Duta Besar bahwa kerjasama yang perlu didorong adalah kerjasama antara KADIN Indonesia dan Mongolia. Direncanakan akan diselenggarakan business forum di Mongolia pada tahun 2016 dan meminta agar di Indonesia dapat dilaksanakan pada tahun 2017. Duta Besar meminta agar delegasi dapat mendorong KADIN Indonesia untuk dapat memenuhi undangan dari KADIN Mongolia untuk ikut dalam event-event EXPO perdagangan di Mongolia.

Di bidang pariwisata, Duta Besar meminta agar dapat diadakan pelatihan industri pariwisata untuk saling tukar menukar pengalaman pengelolaan pariwisata.

Mrs. Oyunchimeg menambahkan bahwa terkait dengan Peringatan 60 tahun Hubungan Indonesia – Mongolia, pihaknya meminta agar dapat dibuka Kantor Dagang Indonesia di Mongolia untuk memperkuat perdagangan antar kedua negara. EXPO perdagangan di Mongolia sendiri akan dilaksanakan pada bulan Juni dan September 2016.

Potensi lain yang dimiliki oleh Mongolia antara lain adalah jasa konstruksi, renewable energy, kain cashmere (kain dari bahan bulu ternak). KADIN-KADIN daerah juga menguasai banyak sektor bisnis. Tukar menukar pengalaman bisnis juga dapat dikoordinasikan melalui forum KADIN dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan.

Ketua Delegasi menyampaikan bahwa saat ini Indonesia menerapkan larangan impor ternak dari negara-negara yang ternaknya terjangkit penyakit mulut dan kuku. Hal ini bisa menjadi peluang bagi Mongolia untuk memasarkan ternaknya ke Indonesia. Pihak delegasi juga akan mendorong KADIN Indonesia untuk memperbaharui MoU antar KADIN kedua negara.

Mrs. Oyunchimeg mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 5 (lima) perusahaan peternakan Mongolia yang mengekspor ternak ke negara-negara China dan Rusia menggunakan standar internasional. Demikian juga telah ada perusahaan peternakan yang mengekspor daging ternak dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Muslim Mongolia. Pada saat penyelenggaraan business EXPO juga akan ditampilkan produk-produk halal yang sudah diekspor ke Malaysia, Iran dan Afghanistan. Mrs. Oyunchimeg akan menginformasikan mengenai tata cara pematangan, prosedur dan teknologi yang digunakan melalui Kedutaan Besar Mongolia di Jakarta.

PERTEMUAN DENGAN MR.TS.MENDSAIKHAN, KETUA PEOPLE'S REPRESENTATIVES HURAL (DPRD) PROVINSI TUV AIMAG

Pada kesempatan ini Ketua Delegasi memperkenalkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.000 pulau yang terdiri dari 34 Provinsi dan sekitar 500 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa dan memiliki sekitar 700 bahasa daerah. Dengan banyaknya Kabupaten Kota di Indonesia, diharapkan dapat terjalin kerjasama *Sister City* antara Kota di Provinsi Tuv Aimag dengan salah satu kota di Indonesia. Hal ini diperlukan bagi peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Mongolia sebagai sesama negara berkembang.

Mr.Ts.Mendsaikhan menjelaskan bahwa DPRD Provinsi Tuv Aimag telah beberapa kali berkunjung ke Yogyakarta. Pada tahun 2008, pejabat pariwisata Provinsi Tuv

Aimag juga telah melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Dalam pertemuan ini juga hadir Gubernur Provinsi Tuv Aimag, Mr. D.Bayarbat.

Kerjasama pariwisata antara Provinsi Yogyakarta dan Provinsi TUV terjalin melalui forum East Asia Inter-regional Tourism Forum (EATOF). EATOF merupakan forum kerjasama sektor pariwisata antara pemerintah regional di kawasan Asia Timur dan beranggotakan 12 (dua belas) provinsi dari sepuluh negara Asia Timur, yaitu: Provinsi Cebu – Filipina, Provinsi Chiang Mai – Thailand, Provinsi Gangwon – Korea Selatan, Provinsi Jilin – RRC, Teritori Primorsky – Rusia, Provinsi Quang Ninh – Vietnam, Negara Bagian Sarawak – Malaysia, Prefektur Tottori – Jepang, Provinsi Tuv – Mongolia, Provinsi D.I. Yogyakarta – Indonesia. Provinsi Luang Prabang – Laos dan Provinsi Siam Reap – Kamboja.

Sidang Standing Committee EATOF pada bulan Maret 2015 di Yogyakarta memutuskan salah satu hasilnya yaitu penyelenggaraan pameran pariwisata (Tourism Expo) di Yogyakarta tahun 2016. Provinsi Tuv Aimag berencana akan mengirim delegasinya dalam forum tersebut.

Pada pertemuan ini juga dibahas kerjasama antara Rumah Sakit Dr. Moewardi Solo dengan Rumah Sakit Kota Zunmood di Provinsi Tuv Aimag. Dalam pertemuan, Duta Besar Mongolia untuk Indonesia, telah menyampaikan undangan dari RS. Dr. Moewardi Solo kepada RS. Zunmood untuk berkunjung ke RS. DR. Moewardi Solo setelah bulan Maret 2016. Undangan diterima langsung oleh Direktur RS. Zunmood, Mrs. Chuluuntsetseg.

PERTEMUAN DENGAN MR. DAMBA GANKHUYAG, SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI MONGOLIA

Mengingat Menteri Luar Negeri Mongolia, Mr. Lundeg Purevsuren berhalangan hadir, maka pertemuan diwakili oleh Mr. Damba Gankhuyag.

Mr. Gankhuyag menjelaskan potensi Mongolia antara lain pertanian dan peternakan yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Mongolia. Berdasarkan statistik, terdapat 60 juta ekor ternak di Mongolia. Tahun ini, Mongolia akan menjadi tuan rumah beberapa event internasional. Pada tanggal 29 Juni 2016, Mongolia juga akan menyelenggarakan Pemilu Parlemen.

Ketua delegasi menjelaskan tujuan kunjungan delegasi GKSB antara lain adalah dalam rangka mempromosikan hubungan bilateral antara kedua negara. Pada 21 Oktober 2015 yang lalu di Jakarta, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, AM Fachir telah melakukan pertemuan dalam format Komisi Bersama untuk Hubungan Bilateral (Joint Commission for Bilateral Cooperation) dengan Wakil Menteri Luar Negeri Mongolia, Damba Gankhuyag. Sebagai representasi rakyat, DPR RI mengapresiasi dan menyambut baik hasil-hasil yang disepakati dalam pertemuan antara RI-Mongolia tersebut.

Pertemuan kali ini diharapkan dapat mempertajam hasil pertemuan dan mendorong tindaklanjut hasil-hasil yang telah disepakati dalam pertemuan dengan Wamenlu RI tersebut.

Ketua delegasi mengungkapkan bahwa dari hasil-hasil pertemuan selama melakukan kunjungan ke Mongolia telah dapat meningkatkan saling paham antara kedua belah pihak.

Disampaikan pula mengenai rencana kunjungan Pimpinan DPR RI dalam Forum ASEP 9 di Mongolia yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 April 2016. DPR RI juga mendukung Forum Asia Europe Meeting (ASEM) yang akan dilaksanakan di Mongolia pada bulan Juli 2016. DPR RI akan mendorong Pihak-pihak eksekutif di Indonesia untuk dapat hadir dalam forum ASEM tersebut.

Dalam kesempatan ini, delegasi GKSB meminta dukungan Mongolia bagi pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2019-2020.

Mr. Gankhuyag menyampaikan apresiasi atas konfirmasi kehadiran Pimpinan DPR RI dalam forum ASEP9. Forum ini diharapkan dapat meningkatkan tidak hanya kerjasama antara kedua parlemen tetapi juga antar parlemen Anggota ASEP. Pihak Mongolia telah menandatangani perjanjian Joint Commission dengan Pihak Indonesia. Beberapa kesepakatan antara lain peningkatan kerjasama di bidang pertanian, peternakan, pertambangan serta prioritas kerjasama di bidang ekonomi.

Untuk bisa diakui di ASEAN, Mongolia juga sudah membuka Kedutaan Besar di Jakarta pada tahun 2014. Dengan adanya Kedubes tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi Indonesia di Mongolia. Kementerian Luar Negeri Mongolia meminta agar Indonesia juga dapat membuka Kedutaan Besar Indonesia di Mongolia untuk mempermudah kerjasama dan penggalian potensi. Beberapa negara yang baru saja membuka Kantor Kedutaan di Mongolia yaitu Italia, Hungaria dan Australia.

Terkait pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, sebagai negara netral, Mongolia memiliki posisi yang sama dengan Indonesia, oleh karena itu pihaknya berharap dapat meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di PBB. Kementerian Luar Negeri akan mendorong kerjasama kedua parlemen dan kedua negara dalam hubungan kerjasama internasional.